

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS, yaitu terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terbentuknya kedua BPJS tersebut, maka jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. (UU RI No. 24 tentang BPJS, 2011)

Selama beroperasi yang kurang lebih 4 tahun, masih ada beberapa masalah yang dialami oleh BPJS kesehatan, salah satu masalah yang masih ada sampai sekarang adalah kepesertaan BPJS kesehatan yang masih jauh dari Universal Health Coverage (UHC) yang ingin dicapai pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah peserta BPJS kesehatan, secara nasional jumlah peserta BPJS kesehatan pada tahun 2016 adalah 171 juta jiwa atau 64 persen dari jumlah penduduk Indonesia, pada tahun 2017 jumlah peserta BPJS kesehatan adalah 187 juta jiwa atau 72 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan terakhir pada tahun 2018 jumlah peserta BPJS kesehatan adalah 197 juta jiwa atau 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Melihat data kepesertaan tersebut dari tahun

2016-2018 mengenai jumlah peserta BPJS kesehatan secara nasional mengalami peningkatan hanya saja program UHC yang ingin dicapai pada tahun 2019 awal dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 95 persen, ada hubungan sosialisasi dengan minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS persen dari total penduduk belum tercapai (BPJS Kesehatan, 2018).

Badan penyelenggara jaminan sosial menyatakan 221.835.244 jiwa penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhitung per Juli 2020. Provinsi Jawa Timur tercatat jumlah peserta sebanyak 12.148.878 (69,54%) jiwa, dan dari jumlah tersebut kepesertaan JKN di provinsi Jawa Timur di dominasi oleh segmen peserta PBI APBN sebesar 53%, dan PPU sebanyak 20%, sedangkan segmen peserta paling sedikit ditempati oleh segmen Bukan Pekerja yakni 2,9% (BPJS, 2020).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang rendah, berdasarkan data kepesertaan BPJS per April 2019, jumlah peserta JKN KIS sebanyak 949.355 (54,38%) jiwa, data tersebut untuk semua segmen kepesertaan dengan jumlah penduduk 1.745.675 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kepesertaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi masih belum menyeluruh dan banyak yang belum tercover oleh jaminan kesehatan Nasional (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2019).

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang jenis kepesertaannya terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). PBI merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang pembayarannya oleh Pemerintah. Sedangkan Non-PBI adalah pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). BPJS Kesehatan yang memiliki sasaran pokok, salah satunya adalah tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional mulai tanggal 1 Januari 2019. Namun tampaknya sasaran tersebut belum tercapai dengan cepat, karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum mengikuti anjuran pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap

sesuatu yang timbul karena kebutuhan yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Dua faktor yang sering dihubungkan dengan minat dalam program pelayanan kesehatan oleh peneliti lain, diantaranya adalah pengetahuan, dan biaya. (Saraswati, 2013; Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, ketika peneliti sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) disalah satu kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, beberapa masyarakat berpendapat bahwa menjadi peserta JKN-KIS tidaklah terlalu penting, karena setiap bulannya harus membayar iuran sebagaimana kewajiban dari peserta JKN-KIS, sedangkan masyarakat sendiri tidak begitu menggunakan kartu JKN-KIS. Hal ini bisa terjadi karena faktor pengetahuan, dimana penduduk belum sepenuhnya mengetahui tentang pentingnya mengikuti program JKN dan sifat kepesertaan yang wajib untuk diikuti. Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting bagi terbentuknya tindakan seseorang. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan JKN. Pengetahuan merupakan indikator seseorang dalam melakukan tindakan. Jika seseorang didasari dengan pengetahuan yang baik terhadap kesehatan maka seseorang tersebut akan memahami pentingnya menjaga kesehatan dan memotivasi untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. (Notoatmodjo, 2007)

Adapun masyarakat yang berasumsi bahwa jika menjadi peserta JKN-KIS khususnya peserta Mandiri, masyarakat tidak akan mampu untuk membayar iuran JKN bagi diri sendiri dan keluarganya karena faktor pendapatan yang diperoleh setiap hari rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diperoleh seseorang guna untuk mencapai kebutuhan hidupnya dan memenuhi finansial keluarga (Suroto, 2000). Beberapa masyarakat ada yang berpendapat lain, ketika peneliti bertanya tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat yang belum terdaftar Program JKN-KIS agar mendaftarkan dirinya dan keluarganya, mereka beranggapan masih mampu membayar sendiri biaya rumah sakit ketika terjadi risiko sakit terhadap dirinya dan keluarganya tanpa menjadi peserta JKN-KIS. Ada juga yang menganggap sepele Program JKN tersebut suatu hal yang tidak

terlalu penting. Dilihat dari hal tersebut masih banyaknya orang yang belum menjadi peserta tampaknya dari minat masyarakat tampak masih rendah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salma Binti Purwaningsih dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Di Desa Tegalsari Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, informasi yang diperoleh, dukungan keluarga dan penghasilan keluarga kepala keluarga dengan keikutsertaan dalam JKN. (Purwaningsih, Salma Binti, 2016)

Dan dari jurnal penelitian terdahulu yang kedua yang dilakukan oleh Wahyu Dewi Hapsari, dkk., dengan judul Analisis Faktor Yang mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan JKN-KIS Mandiri Di Desa Pandanharum Kabupaten Grobogan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan biaya terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS Mandiri di Desa Pandanharum Kabupaten Grobogan. (Hapsari, dkk., 2019)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul tentang Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka telah dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimana Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Mengetahui pendapatan yang diperoleh masyarakat
- c. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa
 - 1) Mahasiswa dapat mengetahui secara lebih tentang gambaran faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
 - 2) Mahasiswa memperoleh wawasan tentang gambaran faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

2. Bagi Masyarakat

Hasil laporan yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang kepeertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan lebih minat untuk menjadi peserta JKN-KIS.

3. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Sebagai tambahan referensi mengenai BPJS Kesehatan, dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan BPJS Kesehatan, menjadikan jurusan kesehatan terapan lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas dan juga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.